

**STUDI KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG DAN PEMERINTAH DAERAH
MUSI BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**



SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar sarjana
ekonomi jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas sriwijaya**

Oleh :

HERSI EKA PUTRI

01043130060

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2008

657.307
Put
2008

**STUDI KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG DAN PEMERINTAH DAERAH
MUSI BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**



16211
16573

SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar sarjana
ekonomi jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas sriwijaya**

Oleh :

HERSI EKA PUTRI

01043130060

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

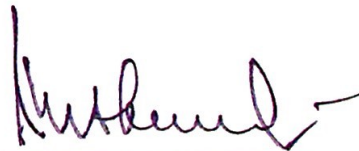
JURUSAN AKUNTANSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HERSI EKA PUTRI
NIM : 01043130060
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Daerah
Musi Banyuasin dalam Perspektif Otonomi Daerah
(Tahun 2004-2006)

Panitia Pengawas Skripsi :

Tanggal : 14 Februari 2008... Ketua Panitia :



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak

Tanggal : 13 Februari 2008... Anggota Panitia :



Sulaiman S. M, SE, Ak, MBA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI

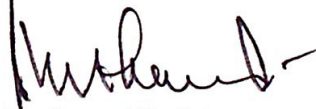
TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : HERSI EKA PUTRI
NIM : 01043130060
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Daerah
Musi Banyuasin dalam Perspektif Otonomi Daerah
(Tahun 2004-2006)

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 12 Februari 2008
dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 15 Februari 2008

Ketua,



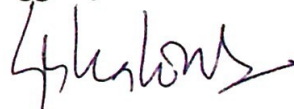
Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP 131801649

Anggota,



Sulaiman, SE, Ak, MBA
NIP 132000094

Anggota,



Drs. Tertiaro, MAFIS, Ak
NIP 131885903

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dra. Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak
NIP 132000097

MOTTO

Masa depan bukan tergantung pada pekerjaan yang dikerjakan melainkan pada orang yang mengerjakannya.

(dr. George Crame)

Janganlah mengukur kesuksesan seseorang dari posisi yang dicapainya saja. Namun nilailah juga dari berbagai rintangan yang berhasil dilaluinya ketika ia berusaha untuk sukses.

(Booker T, Washington)

Dengan rendah hati, skripsi ini

kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku

Adikku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat, rahmat dan izin-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin dalam Perspektif Otonomi Daerah**. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum Pemerintah Daerah, Bab IV Analisis dan Pembahasan dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data sekunder, berupa APBD yang diperoleh dari bagian keuangan Pemkot Palembang dan Pemda Musi Banyuasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2004- 2006 kinerja keuangan Pemkot Palembang dan Pemda Musi Banyuasin belum bisa dikatakan baik. Hal ini terlihat dari beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja, nilainya tidak mencapai standar yang telah ditentukan. Tidak tercapainya standar tersebut antara lain disebabkan oleh masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam membiayai pengeluarannya dan tidak tercapainya target yang ditetapkan pada komponen- komponen pembentuk pendapatan daerah. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja keuangan Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Daerah perlu melakukan penyempurnaan sistem pemungutan pajak yang menjadi sumber utama penerimaan daerah dengan melakukan perbaikan administrasi yang disertai tertib pengawasan yang efektif dan efisien.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dan menjadi bahan masukan akademisi bagi penelitian di bidang akuntansi sektor publik.

Penulis

Hersi Eka Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah Pemkot Palembang dan Pemda Musi Banyuasin dalam Perspektif Otonomi Daerah.” Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr.H. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Sriwijaya.
3. Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Drs. Burhanuddin M.Acc, Ak, Ketua Pembimbing Skripsi
5. Sulaiman S. Manggala, SE, Ak, MBA, Anggota Pembimbing Skripsi
6. Drs. Tertiarto Wahyudi, MAFIS, Ak, Dosen Penguji Skripsi.
7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Pimpinan dan pegawai Pemkot Palembang dan Pemda Musi Banyuasin
9. Kedua orang tuaku dan adikku yang tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan.
10. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Teman- teman sejawat seangkatan di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

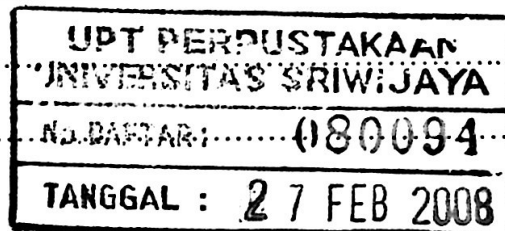
Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,

Hersi Eka Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Jenis Data.....	6
1.4.2. Metode Pengumpulan Data.....	7
1.4.3. Objek Penelitian	7
1.4.4. Metode Analisis Data.....	8
1.5. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Anggaran.....	12
2.1.1. Pengertian Anggaran.....	12
2.1.2. Karakteristik Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.3. Fungsi dan Tipe Anggaran Sektor Publik.....	13
2.2. Keuangan Daerah.....	15
2.2.1. Pengertian Keuangan Daerah.....	15



2.2.2.	Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	16
2.2.3.	Undang- undang Pelaksanaan Keuangan Daerah.....	16
2.2.4.	Hubungan Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah.....	20
2.2.5.	Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
2.3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	21
2.3.1.	Pengertian APBD.....	21
2.3.2.	Mekanisme Perencanaan Anggaran Daerah.....	22
2.3.3.	Proses Penetapan APBD.....	23
2.3.4.	Struktur APBD.....	25
2.4.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
2.4.1.	Pengertian Kinerja Keuangan.....	29
2.4.2.	Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Konsep Rasio Keuangan.....	29
2.4.3.	Keunggulan dan Keterbatasan Rasio Keuangan.....	35

BAB III GAMBARAN UMUM PEMKOT PALEMBANG DAN PEMDA MUSI BANYUASIN

3.1.	Gambaran Umum Kota Palembang.....	37
3.1.1.	Sejarah Umum Kota Palembang.....	37
3.1.2.	Luas Wilayah.....	37
3.1.3.	Letak dan Keadaan Alam.....	38
3.1.4.	Struktur Organisasi.....	39
3.1.5.	Visi, Misi dan Rencana Strategis.....	44
3.1.5.1.	Visi.....	44
3.1.5.2.	Misi.....	44
3.1.5.3.	Rencana Strategis.....	45
3.2.	Gambaran Umum Kabupaten Musi banyuasin.....	46
3.2.1.	Sejarah Umum Kabupaten Musi banyuasin.....	46
3.2.2.	Luas Wilayah.....	46
3.2.3.	Letak dan Keadaan Alam.....	47
3.2.4.	Struktur Organisasi.....	48

3.2.5.	Visi, Misi dan Rencana Strategis.....	54
3.2.5.1.	Visi.....	54
3.2.5.2.	Misi.....	55
3.2.5.3.	Rencana Strategis.....	56
3.3.	Kondisi Keuangan pada APBD Pemkot Palembang dan Pemda Musi Banyuasin.....	57

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN RASIO PADA APBD PEMKOT PALEMBANG DAN PEMDA MUSI BANYUASIN

4.1	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	70
4.2	Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD.....	75
4.2.1	Analisis Rasio Efektivitas.....	75
4.2.2	Analisis Rasio Efisiensi.....	79
4.3	Analisis Rasio Keserasian.....	82
4.4	Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR).....	87
4.5	Analisis Rasio Pertumbuhan.....	90
4.6	Analisis Kontribusi Sumber- sumber Pendapatan dalam Pembentukan Pendapatan Daerah.....	93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Ringkasan APBD Pemkot Palembang Tahun Anggaran 2004.....	58
Tabel 3.2. Ringkasan APBD Pemkot PAlembang Tahun Anggaran 2005.....	60
Tabel 3.3. Ringkasan APBD Pemkot PAlembang Tahun Anggaran 2006.....	62
Tabel 3.4. Ringkasan APBD Pemda Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2004.....	64
Tabel 3.5. Ringkasan APBD Pemda Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2005.....	66
Tabel 3.6. Ringkasan APBD Pemda Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2006.....	68
Tabel 4.1. Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2004- 2006.....	71
Tabel 4.2. Kontribusi Komponen PAD Terhadap Pembentukan PAD Pada Pemkot Palembang.....	71
Tabel 4.3. Kontribusi Komponen PAD Terhadap Pembentukan PAD Pada Pemda Musi Banyuasin.....	72
Tabel 4.4. Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2004- 2006.....	76
Tabel 4.5. Realisasi PAD Atas Target yang Ditetapkan Tahun Anggaran 2004-2006.....	76
Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2004- 2006.....	80
Tabel 4.7. Perhitungan Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Tahun Anggaran 2004- 2006.....	83
Tabel 4.8. Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Tahun Anggaran 2004- 2006.....	83
Tabel 4.9. Perhitungan Rasio Kesenjangan Tahun Anggaran 2004- 2006.....	84
Tabel 4.10. Perbandingan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2004- 2006.....	84
Tabel 4.11. Perhitungan DSCR Tahun Anggaran 2004- 2006.....	88
Tabel 4.12. Rasio Pertumbuhan Pemkot Palembang dan Pemda Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2004- 2006.....	91
Tabel 4.13. Kontribusi Sumber Pendapatan dalam Pembentukan Pendapatan Daerah.....	94
Tabel 4.14. Perhitungan Kontribusi Sumber Pendapatan dalam Pembentukan Pendapatan Daerah.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir-akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat.

Otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan kepada undang-undang nomor 22 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya.

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk semakin nyata memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh serta tantangan untuk mengembangkan kapasitas otonomi yang dimiliki. Bila selama ini kendala kewenangan dan kapasitas kemandirian daerah dikeluhkan, maka era dewasa ini adalah benar-benar merupakan kesempatan untuk

mengembangkan inisiatif, prakarsa dan kreativitas, baik melalui kebijaksanaan perencanaan program maupun aspek kebijaksanaan keuangan daerahnya

Pada umumnya, pemerintah menganggap bahwa akuntabilitas publik (*public accountability*) merupakan prasyarat penting untuk bisa menciptakan efisiensi produksi dan pelayanan jasa publik (Paul 1991). Salah satu isu sentral yang sering berkembang akhir-akhir ini adalah bagaimana pemerintah dan lembaga penyedia layanan publik (*public service provider*) mampu bersikap lebih akuntabel terhadap masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang diberikannya.

Dengan adanya otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jika sebelumnya daerah hanya sebagai operator saja dalam pembangunan, maka kini peran daerah meluas menjadi *inisiator, planner, fund raising* bahkan *supervisor* atau *evaluator*. Kewenangan membuat kebijakan (peraturan daerah) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas.

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini

ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. (Bastian 2006).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya sumber daya manusia yang berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Reformasi administrasi publik yang terjadi belakangan ini berfokus kepada konsep kinerja dan efektivitas. Gerakan pembaharuan administrasi publik yang disebut *New Public Management* (NPM) atau *reinvention* adalah upaya meningkatkan kinerja. Meskipun organisasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis akan tetapi paradigma baru Administrasi Publik yang dipelopori oleh Ted Gabler dan David Osborne dengan karyanya "*REINVENTING GOVERNMENT*" telah memberikan inspirasi bahwa administrasi publik harus dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis, efisien, efektif dan menempatkan masyarakat sebagai *stake holder* yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Selain itu, semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing antar negara juga mengakibatkan daya saing antar pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah.

Misi utama diselenggarakannya otonomi daerah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Kinerja keuangan ini dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuan untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber- sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas- luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dua daerah besar di provinsi Sumatera Selatan yang berkembang cukup pesat terutama dalam hal pembangunan. Dalam menghadapi otonomi daerah kinerja keduanya terbilang baik dengan penggunaan dana yang sama besar, mampu membangun dan memajukan daerahnya dengan inisiatif dan kreativitas sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Untuk mengetahui apakah kinerja keduanya sama efektif dan efisien perlu dilakukan pengukuran dari aspek keuangannya.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka skripsi ini diberi judul :
“Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin Dalam Perspektif Otonomi Daerah”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada bagian 1.1, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota Palembang dalam perspektif otonomi daerah tahun 2004, 2005, 2006?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Musi Banyuasin dalam perspektif otonomi daerah tahun 2004, 2005, 2006?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan kedua daerah dalam perspektif otonomi daerah tahun 2004, 2005, 2006?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada judul dan permasalahan dari skripsi ini, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengukur kinerja keuangan PEMKOT Palembang dalam perspektif otonomi daerah.
2. Untuk mengukur kinerja keuangan PEMDA Musi Banyuasin dalam perspektif otonomi daerah.
3. Untuk membandingkan kinerja PEMKOT Palembang dan PEMDA Musi Banyuasin dalam perspektif otonomi daerah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat seperti :

1. Dapat memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
2. Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Bagi pemerintah daerah dan pihak terkait, dapat dijadikan sebagai bahan motivasi untuk bekerja dan bersaing lebih baik lagi.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Indriantoro & Supomo (2002:146-147), data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tanpa media perantara).

Data ini berupa hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan ataupun tidak. (Indriantoro & Supomo, 2002:147). Data ini berupa anggaran yang di ambil dari bagian keuangan Pemkot Palembang dan Pemda Musi Banyuasin.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan data yang diperoleh dari sumbernya. Adapun cara pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Dengan menggunakan, mengumpulkan dan mempelajari buku- buku, literatur-literatur serta artikel- artikel yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dengan mengunjungi secara langsung objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu (Indriantoro & Supomo, 2002:152):

1. Wawancara

Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak- pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan mencari data berupa anggaran yang ada di bagian keuangan PEMKOT Palembang dan PEMDA Musi Banyuasin.

1.4.3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bagian keuangan Pemkot Palembang dan Pemda Musi Banyuasin. Objek penelitian yang akan digunakan adalah

struktur APBD PEMKOT Palembang dan PEMDA Musi Banyuasin dalam era otonomi daerah, yaitu tahun 2004, 2005 dan 2006.

1.4.4. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Dalam tahap ini data yang dikumpulkan akan dianalisis sehingga dapat disimpulkan suatu jawaban permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik analisis yang dipakai oleh penulis adalah:

1. Kuantitatif Deskriptif

Data kuantitatif berupa data finansial, yaitu anggaran yang diperoleh dari bagian keuangan PEMKOT Palembang dan PEMDA Musi Banyuasin tahun 2004, 2005, 2006.

Rasio- rasio yang digunakan dalam metode analisis data ini antara lain :

$$1. \text{ Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi\&Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

4. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

$$(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}$$

$$\text{DSCR} = \frac{\text{Total (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}}{\text{Total (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak)

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib (Belanja Rutin+DAK)

5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

6. Mengukur Kontribusi Sumber- sumber Pendapatan dalam Pembentukan Pendapatan Daerah.

$$\text{Kontribusi Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Kontribusi Dana Perimbangan} = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Kontribusi Pinjaman Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pinjaman Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Kontribusi Lain- lain Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Lain- lain Pendapatan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2. Deskriptif Komparatif

Metode ini dimaksudkan untuk melihat gambaran kinerja keuangan PMKOT Palembang dan PEMDA Musi Banyuasin dari sisi APBD masing- masing daerah, kemudian membandingkan kinerja keduanya dalam menghadapi otonomi daerah.

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran jelas, maka penulis akan menguraikannya ke dalam 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan dan evaluasi masalah dalam penelitian ini seperti konsep keuangan daerah, konsep anggaran, karakteristik anggaran sektor publik, pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan struktur APBD.

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH

Dalam bab ini akan dijelaskan kondisi umum PEMKOT Palembang dan PEMDA Musi Banyuasin sebagai objek yang diteliti mulai dari struktur organisasi, tujuan organisasi, visi, misi dan kondisi keuangan pada APBD Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu data- data yang berhubungan dengan perhitungan terhadap kinerja keuangan daerah Musi Banyuasin dan kota Palembang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan atas pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bab- bab sebelumnya serta memberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2006.
- , *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Departemen Keuangan RI, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah*, Penerbit Redaksi Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Fitriah, *Analisa Perbandingan Rasio Keuangan pada APBD Pemkot Pangkalpinang dan Palembang sebagai Tolak Ukur Dalam Menilai Kemandirian Keuangan Daerah dalam Membiayai Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Skripsi Akuntansi, 2004.
- Halim, Abdul, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan DAerah*, Penerbit (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- , *Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Kuntadi, Cris, *Akuntansi Sektor Publik dan Karakteristik Khusus Akuntansi Pemerintahan*, Makalah Akuntansi Keuangan Daerah, Pelatihan dan Pengenalan Akuntansi Keuangan Daerah, 2003.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Muchlis, dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2002.
- Sari, Citra Devi, *Studi Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Pemkot Pagaram dengan Pemkot Prabumulih)*, Skripsi Akuntansi, 2005.
- Wikipedia, *Anggaran Sektor Publik*, 2007, Diakses pada tanggal 10 Januari 2008 dari <http://www.google.com>.